

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Mayong

Kecamatan Mayong adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Mayong terletak di atas ketinggian antara 13 hingga 438 meter dari permukaan laut. Kecamatan Mayong terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Jepara yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Nalumsari di sebelah timur, Kecamatan Kalinyamatan, Welahan, dan Batealit di sebelah barat, Kecamatan Batealit di sebelah utara, dan Kecamatan Welahan di sebelah selatan. Sementara itu, jarak dari Kecamatan Mayong ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 24,2 km.¹

Secara administratif Kecamatan Mayong terdiri dari 18 desa/kelurahan yaitu:

- a. Mayong Kidul
- b. Mayong Lor
- c. Tigajuru
- d. Paren
- e. Kuanyar
- f. Pelang
- g. Sengonbugel
- h. Pelemkerep
- i. Singorojo
- j. Jebol
- k. Buaran
- l. Ngroto
- m. Rajekwesi
- n. Datar
- o. Pule
- p. Bandung
- q. Bungu
- r. Pancur

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “Kecamatan Mayong Dalam Angka”, 2022. 4

Luas wilayah Kecamatan Mayong tercatat kurang lebih 73,64 km², dengan perincian luas daerah menurut desa atau kelurahan di Kecamatan Mayong sebagaimana dalam tabel:

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mayong

No	Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Mayong Kidul	2,59	3,51
2	Mayong Lor	3,15	4,27
3	Tigajuru	1,59	2,16
4	Paren	1,24	1,69
5	Kuanyar	2,04	2,78
6	Pelang	2,04	2,76
7	Sengonbugel	5,48	7,45
8	Pelemkerep	0,82	1,11
9	Singorojo	3,29	4,47
10	Jebol	1,57	2,14
11	Buaran	6,84	9,29
12	Ngroto	4,15	5,63
13	Rajekwesi	4,24	5,76
14	Datar	3,52	4,78
15	Pule	5,74	7,79
16	Bandung	3,38	4,59
17	Bungu	10,00	13,58
18	Pancur	11,96	16,24
Mayong		73,64	100,00

2. Aspek Pendidikan, Aspek Agama, dan Aspek Sosial

a. Pendidikan

Rata-rata pendidikan masyarakat Kecamatan Mayong lulusan SLTA sederajat. Pada umumnya memilih bekerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya peluang dan kesempatan bekerja yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Alhasil banyak sarjana di Kecamatan Mayong yang hanya bekerja seadanya dan adapula yang memilih untuk berwirausaha. Selain itu, berdirinya pabrik-pabrik asing yang ada di Kecamatan

Mayong yang hanya memerlukan ijazah SMP dan SMA/ sederajat untuk melamar pekerjaan. Oleh karena itu, rata-rata masyarakat Kecamatan Mayong yang telah lulus dari sekolah menengah atas lebih tertarik untuk bekerja di pabrik dibandingkan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Seiring berjalannya waktu tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Mayong berkembang sangat pesat. Kecamatan Mayong telah memiliki sarana pendidikan yang jumlahnya sangat banyak. Terbukti dengan adanya sarana dan prasarana sekolah yang lengkap baik pendidikan formal maupun pendidikan agama serta pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan terendah hingga dengan jenjang pendidikan tertinggi.

Adapun perincian banyaknya desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Mayong tahun 2019- 2021 sebagaimana dalam tabel:

Tabel 4.2 Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mayong Tahun 2019- 2021

No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021
1	Sekolah Dasar (SD)	18	18	18
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	9	9	10
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6	6	6
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	5	5	5
5	Akademi/Perguruan Tinggi	1	1	1

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Swasta di Kecamatan Mayong

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	34
2	Raudhatul Athfal (RA)	9
3	Sekolah Dasar Swasta	5
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	12
5	SLTP/SMP Swasta	6
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	8
7	SLTA/SMA Swasta	2
8	Madrasah Aliyah (MA)	4
9	SMK Swasta	6

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Negeri di Kecamatan Mayong

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar Negeri	41
2	SLTP/SMA Negeri	2
3	SLTP/SMA Negeri	1

b. Agama

Masyarakat Kecamatan Mayong sangat kukuh dalam memeluk dan mengamalkan agamanya. Dengan adanya tingkat keyakinan yang tinggi dan keinginan untuk mengembangkan agama, maka para kyai dan ulama banyak yang mendirikan sekolah berbasis agama islam, seperti TPQ dan Madrasah. Selain itu dibangun pula pondok pesantren dan adanya jam'iyah pengajian-pengajian di musholla dan masjid.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Mayong beragama islam, pada umumnya menganut faham keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sedangkan agama lain sebagai minoritas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Mayong.

Adapun perincian jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Mayong sebagaimana dalam tabel:

Tabel 4.5 Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Mayong

No	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Musholla	79
2	Masjid	321
3	Gereja Protestan	1
4	Gereja Katholik	1
5	Pura	0
6	Vihara	0

c. Sosial (Jumlah Penduduk)

Berdasarkan dengan sensus penduduk pada tahun 2021, maka jumlah penduduk di Kecamatan Mayong yaitu 92.637 jiwa yang terbagi atas 46.464 jiwa laki-laki dan 46.173 jiwa perempuan.²

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, "Kecamatan Mayong Dalam Angka", 2022. 19

Adapun perincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut desa atau kelurahan di Kecamatan Mayong pada tahun 2019-2021 sebagaimana dalam tabel:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Mayong Pada Tahun 2019-2021

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Mayong Kidul	2.679	2.755	5.434
2	Mayong Lor	6.270	6.051	12.321
3	Tigajuru	1.466	1.425	2.891
4	Paren	1.104	1.099	2.203
5	Kuanyar	2.173	2.107	4.280
6	Pelang	2.856	2.730	5.586
7	Sengonbugel	2.667	2.563	5.230
8	Pelemkerep	2.778	2.810	5.588
9	Singorojo	3.367	3.431	6.798
10	Jebol	1.830	1.927	3.757
11	Buaran	3.313	3.337	6.650
12	Ngroto	2.192	2.216	4.408
13	Rajekwesi	2.689	2.677	5.366
14	Datar	1.605	1.630	3.235
15	Pule	1.313	1.375	2.688
16	Bandung	1.075	1.075	2.150
17	Bungu	1.365	1.396	2.761
18	Pancur	5.722	5.569	11.291
Mayong		46.464	46.173	92.637

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mayong

Keadaan sosial masyarakat Kecamatan Mayong tampak cukup baik yaitu mempunyai rasa kebersamaan, solidaritas sosial dan toleransi yang cukup tinggi karena Kecamatan Mayong masih memegang Kultur kebersamaan dan jiwa sosial masyarakat cukup kuat. Pada umumnya karakteristik masyarakat Kecamatan Mayong masih lekat dengan semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong.

Masyarakat Kecamatan Mayong tergolong dalam masyarakat heterogen, baik dalam hal pendidikan, agama, ekonomi, serta hal lainnya. Terdapat beberapa kegiatan rutin yang melibatkan semua lapisan masyarakat, misalnya posyandu, Ibu PKK, yasinan, berjanjengan, pengajian tahlilan, serta kegiatan lainnya. Salah satu bentuk kebersamaan masyarakat

yaitu jika ada masyarakat yang memiliki hajat, masyarakat lainnya berkumpul dan bersatu untuk saling membantu.

Secara umum, toleransi antar umat beragama di Kecamatan Mayong sangat menakjubkan. Hal ini terlihat dalam relasi antar umat beragama yang dilandasi saling menghormati dan menghargai dalam menjalankan agama serta melakukan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat Kecamatan Mayong bisa dikatakan cinta kedamaian, karena penulis jarang menemukan adanya konflik antar masyarakat yang mengakibatkan permusuhan, jika ada pun pasti langsung diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, perlu diingat bahwa masyarakat Kecamatan Mayong merupakan masyarakat yang heterogen, masih terdapat beberapa penyakit masyarakat dan permasalahan sosial, misalnya minum-minuman beralkohol dan bermain judi yang membuat keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, perlunya upaya dari masyarakat untuk menangani penyakit masyarakat dan permasalahan sosial tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Mayong pada umumnya berada pada taraf menengah ke bawah. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Mayong sebagian besar adalah PNS, buruh tani, pedagang, pengrajin tanah liat, buruh pabrik, dan tukang bangunan. Mayoritas masyarakat berpenghasilan sebagai pedagang karena dianggap sangat menguntungkan, alhasil terdapat banyak toko-toko atau warung kecil di sekitar pemukiman penduduk atau berjualan keliling dengan menjajakan dagangannya yang dibeli dari pasar. Sementara itu, pedagang yang menjual sembako memasarkan dagangannya ke pasar-pasar yang ada di Kecamatan Mayong seperti Pasar Mayong di Desa Mayong lor dan Pasar Pancur di Desa Pancur. Jenis pekerjaan lain adalah buruh tani yang menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan komoditas utama padi, tebu, singkong, jagung, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Selain itu adapula yang bekerja sebagai pengrajin tanah liat seperti industri batu bata, industri genteng di Mayong Kidul dan kerajinan gerabah di Mayong Lor. Sementara itu, sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai wiraswasta dan buruh pabrik. Terdapat banyak pabrik-pabrik asing yang ada di Kecamatan Mayong seperti pabrik kabel,

pabrik sepatu, dan garmen. Rata-rata masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik biasanya berumur 18 atau lulusan SMA hingga umur 35 tahun.

B. Hasil Penelitian

1. Partisipasi Politik Komunitas Komunitas Perempuan Pekerja Pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara

Pemaparan terkait dengan partisipasi politik komunitas perempuan pekerja pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara tentang partisipasi politik komunitas perempuan pekerja pabrik dalam menyuarakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah menurut informan KW sebagai pekerja pabrik 1 dalam wawancara menyampaikan bahwa: *“Pada saat itu saya ikut memilih, kan hak pilih saya masih aktif dan sayang jika hak pilih saya tidak saya gunakan”*.³

Sementara itu informan lain yakni ENM sebagai Pekerja Pabrik 7 dalam wawancara juga menyampaikan bahwa: *“Saya mengikuti pemilihan bupati yang kemarin. Meskipun saya sibuk bekerja di pabrik, tapi saya tidak lupa akan keharusan sebagai warga negara yang baik kan memang harus menyuarakan hak pilih. Kalau tidak salah kemarin yang jadi bupatinya Pak Marzuqi”*.⁴

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa komunitas perempuan pekerja pabrik memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam menyuarakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah 2017 di Kabupaten Jepara.

Lebih lanjut lagi peneliti juga menggali informasi dengan informan AZ sebagai Pekerja Pabrik 2 terkait dengan tentang pentingnya pemilihan kepala daerah yaitu:

“Pemilihan kepala daerah itu contohnya seperti pemilihan bupati, waktu pemilihan kemarin yang jadi itu kan Pak Marzuqi dan wakilnya Pak Dian. Menurut saya pilkada itu sangat penting untuk melakukan pergantian pemimpin sekaligus memilih seorang pemimpin daerah yang baru”.⁵

³ Hasil wawancara dengan KW sebagai Pekerja Pabrik 1, 7 Oktober 2023

⁴ Hasil wawancara dengan ENM sebagai Pekerja Pabrik 7, 7 Oktober 2023

⁵ Hasil wawancara dengan AZ sebagai Pekerja Pabrik 2, 7 Oktober 2023

Senada dengan apa yang diungkapkan di atas, informan lain yakni AL sebagai Pekerja Pabrik 8 dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Kan sudah jelas ya, yang namanya pemilihan umum pasti memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat. Kalau di tingkat daerah seperti Jepara itu kan memilih Bupati. Pemilihan bupati dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tapi sekarang belum ada pemilihan lagi dan terakhir pemilihan bupati itu pada tahun 2017. Mungkin akan dilaksanakan pemilihan secara serentak seperti dulu”.⁶

Lalu peneliti juga menggali informasi dengan informan SAN sebagai Pekerja Pabrik 13 terkait dengan pasangan calon bupati mana yang akan dipilih dan alasan memilih pasangan calon tersebut yaitu:

“Saat pemilihan bupati kemarin saya memilih pasangan Ahmad Marzuqi dan Dian Kristiandi. Menurut saya program kerja mereka bagus. Selain itu, bupati sebelumnya yang jadi kan Pak Marzuqi, kepemimpinannya pada saat bagus. Oleh karena itu, pada pemilihan bupati 2017 saya memilih pak Marzuqi lagi.”⁷

Sementara itu informan lain yakni PD sebagai Pekerja Pabrik 9 dalam wawancara juga berpendapat bahwa:

“Kalau tidak salah, saya memilih Pak Marzuqi dan Pak Dian. Pada saat itu saya memilih secara asal, soalnya kan sehari-hari sibuk bekerja di pabrik. Jadi saat ada pencoblosan ya tinggal nyoblos aja, memilih sesuai keinginan hati, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu paslon mana yang paling baik”.⁸

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa komunitas komunitas perempuan pekerja pabrik lebih memilih pasangan Ahmad Marzuqi dan Dian Kristiandi.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi dengan informan ELM sebagai Pekerja Pabrik 4 terkait dengan cara pekerja pabrik dalam mengetahui informasi tentang kedua paslon bupati, yaitu:

“Saya taunya dari ikut nimbrung dengan tetangga. Saat libur kerja kan sering kumpul-kumpul, kadang cerita

⁶ Hasil wawancara dengan AL sebagai Pekerja Pabrik 8, 8 Oktober 2023

⁷ Hasil wawancara dengan SAN sebagai Pekerja Pabrik 13, 8 Oktober 2023

⁸ Hasil wawancara dengan PD sebagai Pekerja Pabrik 9, 8 Oktober 2023

tentang pemilu terutama tentang latar belakang, visi misi dan program kerja calonnya. Selain itu dari baliho yang ada di pinggir jalan dan kadang saat kumpulan ibu-ibu di musholla juga ada orang dari perangkat desa atau panitia pemilihan yang memberikan informasi tentang pemilihan, misalnya informasi tentang calon dan tata cara pemilihan”.⁹

Sementara itu, informan lain yakni MUS sebagai Pekerja Pabrik 10 juga berpendapat bahwa:

“Saya taunya dari kader atau tim sukses calon. Kadang setiap mau pemilihan kan ada kader-kader atau tim sukses calon yang datang ke rumah-rumah, mereka memberitahu informasi tentang calon itu. Selain itu dari alat peraga kampanye, spanduk-spanduk yang ada di pinggir jalan”.¹⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, informan lain yakni KW sebagai Pekerja Pabrik 1 juga berpendapat bahwa: “*Paling dari media sosial. Seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan media sosial sebagai pertimbangan untuk memilih dan menilai masing-masing calon*”.¹¹

Lalu peneliti juga menggali informasi dengan informan ibu NR sebagai Pekerja Pabrik 11 mengenai bentuk partisipasi politik yang dilakukan pekerja pabrik, yaitu: “*Cuma sebagai pemilih biasa, tidak mempunyai keinginan untuk menjadi panitia atau tim sukses. Soalnya setiap hari kan sibuk kerja, pulang kerja terus mengurus keluarga. Jadi tidak ada waktu untuk mengurus begituan*”.¹²

Senada dengan pendapat di atas, informan lain yakni JU sebagai Pekerja Pabrik 12 juga berpendapat bahwa: “*Saat pemilihan bupati saya hanya pemilih, tidak ikut dalam kegiatan lain. Kalau saat pemilihan legislatif, saya pernah ikut tim sukses calon*”.¹³

⁹ Hasil wawancara dengan ELM sebagai Pekerja Pabrik 4, 8 Oktober 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan MUS sebagai Pekerja Pabrik 10, 7 Oktober 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan KW sebagai Pekerja Pabrik 1, 7 Oktober 2023

¹² Hasil wawancara dengan NR sebagai Pekerja Pabrik 11, 15 Oktober 2023

¹³ Hasil wawancara dengan JU sebagai Pekerja Pabrik 12, 15 Oktober 2023

2. Motif yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Komunitas Pekerja Pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara

Pemaparan terkait dengan motif yang mempengaruhi Partisipasi Politik Komunitas Pekerja Pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara yaitu: *“Saya ikut memilih karena kesadaran pribadi, kan pemilu itu sangat penting untuk mencari seorang pemimpin yang diinginkan dan menurut saya dapat dipercaya”*.¹⁴

Senada dengan pendapat di atas, informan lain yakni SN sebagai Pekerja Pabrik 13 juga berpendapat bahwa: *“Saya ikut mencoblos karena saya sadar bahwa memilih seorang pemimpin adalah suatu kewajiban. Selain itu, saya tidak mau menyalahkan hak pilih saya”*.¹⁵

Sementara itu, informan lain yakni KN sebagai Pekerja Pabrik 6 juga berpendapat bahwa: *“Saya ikut mencoblos karena diajak keluarga dan tetangga. Misalnya diajak pergi ke TPS bersama-sama, jadi ada temannya, tidak pergi sendirian”*.¹⁶

Lalu informan lain yakni FDN sebagai Pekerja Pabrik 5 juga berpendapat bahwa: *“Dari pada golput mending memilih. Saya pernah dengar cerita dari orang-orang jika golput bisa digunakan untuk manipulasi hasil perolehan suara”*.¹⁷

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi terkait dengan harapan pekerja pabrik untuk kesejahteraan pekerja pabrik jika terjadi pergantian pemimpin daerah yang baru yaitu:

“Hak-hak karyawan harus terpenuhi, jika ada karyawan yang berbuat salah jangan memakai kekerasan, misalnya sering dibentak dan mendapatkan perkataan yang kasar-kasar oleh atasan. Hal itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental pekerja. Selain itu terkait dengan pelecehan seksual apa yang dialami oleh teman saya. Oleh karena itu, saya berharap agar pemerintah membuat peraturan-peraturan yang dapat melindungi pekerja dan

¹⁴ Hasil wawancara dengan AZ sebagai Pekerja Pabrik 2, 7 Oktober 2023

¹⁵ Hasil wawancara dengan SN sebagai Pekerja Pabrik 13, 22 Oktober 2023

¹⁶ Hasil wawancara dengan KN sebagai Pekerja Pabrik 6, 22 Oktober 2023

¹⁷ Hasil wawancara dengan FDN sebagai Pekerja Pabrik 5, 22 Oktober 2023

melakukan terjun ke lapangan terkait dengan permasalahan itu”¹⁸

Senada dengan pendapat di atas, informan lain yakni ELM sebagai Pekerja Pabrik 4 juga berpendapat:

“Membuat peraturan-peraturan yang dapat melindungi pekerja pabrik, semisal ada peraturan kan perusahaan wajib mematuhi peraturan tersebut. Soalnya rata-rata pabrik di Jepara ini kan milik orang asing, jadi agar mereka tidak bisa semena-mena lagi. Seperti, ada beberapa pabrik yang pulanginya molor jika belum mencapai target produksi. Misal lembur selama 2 jam, akan tetapi belum mencapai target 200 dan harus menyelesaikannya diluar dari jam lembur. Selain itu waktu yang digunakan untuk menyelesaikan target produksi tersebut tidak dihitung sebagai tambahan waktu lembur dan tidak dibayar”¹⁹

Sementara itu, informan lain yakni LN sebagai Pekerja Pabrik 14 juga berpendapat bahwa:

“Kalau bisa UMR-nya dinaikin lagi, tahun 2022 UMR naik cuma Rp 1.000 dan tahun ini naik sekitar Rp 100.000. Uang segitu dapat apa, kebutuhan sehari-hari saat ini kan meningkat, semua serba mahal. Kalau tidak ada peningkatan UMR, tidak akan cukup untuk kebutuhan sehari-hari”²⁰

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Komunitas Komunitas perempuan pekerja pabrik pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara

Pemaparan terkait dengan faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik komunitas perempuan pekerja pabrik pada pilkada 2017 di Kabupaten Jepara yaitu:

“Kalau faktor pendukung paling tempat pemilihan yang dekat mas, di depan rumah sendiri kok. Sedangkan faktor penghambatnya paling ada rasa malas untuk pergi ke TPS, meskipun TPS-nya dekat dari rumah. Selain itu,

¹⁸ Hasil wawancara dengan ENM sebagai Pekerja Pabrik 7. 7 Oktober 2023

¹⁹ Hasil wawancara dengan ELM sebagai Pekerja Pabrik 4, 8 Oktober 2023

²⁰ Hasil wawancara dengan LN sebagai Pekerja Pabrik 14, 22 Oktober 2023

kurangnya pengetahuan tentang politik, yang saya tau cuma saat ada pemilihan ya tinggal milih saja”.²¹

Selain itu, informan lain yakni SAN sebagai Pekerja Pabrik 13 juga berpendapat bahwa:

“Faktor pendukungnya karena ada kesadaran pribadi, memilih pemimpin kan suatu keharusan bagi warga negara. Sayang kan misal mempunyai hak pilih tapi tidak digunakan. Sedangkan faktor penghambatnya, saya masih ada rasa khawatir jika salah pilih, jika pemimpin yang saya pilih tidak amanah misalnya berbuat korupsi”.²²

Sementara itu, informan lain yakni KW sebagai pekerja pabrik 1 juga berpendapat bahwa:

“Kalau faktor pendukungnya itu saat waktu pemilihan kan mendapatkan kompensasi apakah diliburkan atau mendapatkan waktu izin yang cukup buat mencoblos. Selain itu karena disuruh keluarga, misal kalau belum mencoblos pastinya kan disuruh-suruh terus untuk segera mencoblos. Selain itu, kalau kita sudah mendapatkan hak pilih kan biasanya ada datanya, jadi khawatir dan merasa malu jika ketahuan golput. Sedangkan faktor penghambatnya mungkin ada rasa malas selain itu karena masalah waktu, kan setiap orang mempunya kesibukan lain”.²³

Lalu informan lain yakni FDN sebagai Pekerja Pabrik 5 juga berpendapat bahwa:

“Kalau faktor pendukungnya itu seperti apa yang saya katakan tadi, jika saya golput dan tidak ikut memilih, saya khawatir jika jatah suara saya akan dimanipulasi maksudnya digunakan untuk menambah suara pada salah satu calon. Mending milih secara asal daripada golput. Selain itu karena adanya motivasi untuk memilih pemimpin baru. Kalau faktor penghambatnya jika tidak ada calon yang saya pilih, alhasil saya memilih secara asal”.²⁴

²¹ Hasil wawancara dengan AL sebagai Pekerja Pabrik 8, 8 Oktober 2023

²² Hasil wawancara dengan SAN sebagai Pekerja Pabrik 13, 8 Oktober 2023

²³ Hasil wawancara dengan KW sebagai Pekerja Pabrik 1, 7 Oktober 2023

²⁴ Hasil wawancara dengan FDN sebagai Pekerja Pabrik 5, 22 Oktober 2023

C. Analisis dan Pembahasan

1. Partisipasi Politik Komunitas Perempuan Pekerja Pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara

Partisipasi politik komunitas perempuan pekerja pabrik Di Kecamatan Mayong pada pilkada 2017 di Kabupaten Jepara dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masyarakat yang sudah mempunyai kesadaran dalam berpartisipasi politik yang diwujudkan dengan ikut serta dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.

Meningkatnya kesadaran komunitas perempuan pekerja pabrik untuk berpartisipasi dalam politik menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan demokrasi di tingkat lokal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hemafitria dkk, kesadaran masyarakat mengarah pada partisipasi politik yang berarti proses terjadinya perubahan kepentingan publik dalam bidang struktur politik. Secara khusus kekuasaan dan peranan rakyat dalam pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, yang mana rakyat memiliki peranan dalam menentukan kegiatan politik di wilayahnya dengan menyuarakan hak pilih.²⁵

Kesadaran politik mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Karena ketika seseorang sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara, maka akan mendorong orang untuk berpartisipasi dalam politik.²⁶

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mempunyai suara langsung dalam memilih pemimpin daerah. Selain itu, pilkada juga memiliki peran penting untuk memastikan pergantian kepemimpinan di daerah berlangsung secara demokratis.²⁷

²⁵ Hemafitria Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, and Fitriani Fitriani, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, no. 1 (2021): 30, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>.

²⁶ Hasil wawancara dengan ENM sebagai Pekerja Pabrik 7, 7 Oktober 2023

²⁷ Hasil wawancara dengan AZ sebagai Pekerja Pabrik 2, 7 Oktober 2023

Pilkada memiliki beragam pentingnya dalam konteks pemerintahan lokal dan demokrasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pilkada dianggap penting, antara lain:²⁸

- a. Penentuan kepemimpinan lokal.
Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan pergantian kepemimpinan secara konstitusional dan mereformasi pemerintahan. Selain itu, Pilkada memungkinkan warga negara daerah untuk memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Pemimpin ini bertanggung jawab atas mengelola pemerintahan di tingkat lokal dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
- b. Demokrasi Lokal
Pilkada adalah salah satu pilar demokrasi lokal. Ini memberikan warga daerah kesempatan untuk berpartisipasi dalam poses pengambilan keputusan politik, menyuarakan suara mereka, dan memengaruhi arah pembangunan dan kebijakan di tingkat lokal.
- c. Kontrol Anggaran Publik
Pilkada yang sesuai dengan keinginan masyarakat dapat memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemimpin yang dipilih akan memiliki peran dalam merancang dan melaksanakan anggaran daerah.
- d. Representasi Nilai dan Aspirasi
Pilkada memungkinkan warga daerah untuk memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan aspirasi mereka. Pemimpin yang terpilih diharapkan akan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi masyarakat setempat.
- e. Peningkatan Kualitas Hidup
Pilkada yang kompeten dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dapat memajukan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

²⁸ “Mendagri Jelaskan Pentingnya Pilkada”, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, 2015, diakses pada tanggal 9 November 2017 <https://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-jelaskan-pentingnya-pilkada/>

- f. Pertanggungjawaban dan Transparansi
Pilkada menciptakan mekanisme pertanggungjawaban. Pemimpin yang terpilih dapat dipantau oleh warga dan media, dan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.
- g. Penghindaran Kekuasaan Tunggal
Pilkada merupakan cara untuk menjaga agar kekuasaan tidak berkumpul pada satu pihak atau individu dalam pemerintahan daerah.
- h. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat
Proses pemilu lokal memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik serta berpartisipasi dalam pemerintahan daerah, yang pada gilirannya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kebijakan dan pengambilan keputusan.²⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Komunitas Perempuan Pekerja Pabrik menganggap pilkada sangat penting untuk melakukan pergantian pemimpin sekaligus memilih pemimpin daerah yang baru.³⁰

Pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan sebutan “Pilkada” merupakan bentuk pelaksana demokrasi di Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pilkada diadakan untuk memilih pemimpin daerah, seperti gubernur, walikota, dan bupati. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan kepala daerah di Jepara dilaksanakan secara serentak pada 15 Februari 2017 dengan 100 daerah lainnya yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

Pada pemilihan kepala daerah kabupaten Jepara merupakan pemilihan umum untuk memilih bupati dan wakil bupati. Pada pilkada Jepara terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan calon nomor urut 1 yaitu Dr. H. Subroto, SE, MM - H. Nur Yahman, SH dan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ahmad Marzuqi, SE - Dian Kristiandi, S.Sos. Pada pilkada Jepara 2017 ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 yaitu Ahmad Marzuqi, SE dan Dian

²⁹ TB News, “Tujuan, Manfaat serta Makna dari Pilkada”, Tribatanews.kepri.polri. go.id, 2020, diakses pada tanggal 12 November 2023 <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/10/01/tujuan-manfaat-serta-makna-dari-pilkada/>

³⁰ Hasil Wawancara dengan AZ sebagai Pekerja Pabrik 2, 7 Oktober 2023

Kristiandi, S.Sos yang memperoleh suara sebesar 319.837 atau setara dengan 51,25%. Sedangkan pasangan nomor urut 1 yaitu Dr. H. Subroto, SE, MM dan H. Nur Yahman, SH mendapatkan suara sebesar 304.259 atau setara dengan 48,75%.³¹

Dilihat dari data di atas, sesuai dengan temuan pada penelitian bahwa komunitas perempuan pekerja pabrik lebih memilih pasangan calon Ahmad Marzuqi dan Dian Kristiandi.³² Alasan mereka memilih calon tersebut dikarenakan berbagai hal mulai dari profil calon, program kerja dan visi misinya, serta memilih secara asal.

Dalam memilih calon kepala daerah, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor dalam memilih kepala daerah agar kepala daerah yang terpilih nantinya dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di daerah serta memiliki integrasi yang baik. Adapun beberapa faktor-faktor Komunitas Perempuan Pekerja Pabrik dalam memilih calon kepala daerah antara lain:

- a. Memilih berdasarkan profil calon, visi misi dan program kerja

Memilih calon kepala daerah dengan mencari tahu latar belakang pribadi, pendidikan, dan pengalaman calon kepala daerah. Selain itu, mencari tahu informasi tentang visi dan misi calon yang mencerminkan tujuan dan nilai-nilai yang ingin mereka wujudkan. Serta mempelajari program kerja mereka, yaitu rencana konkret yang akan diimplementasikan untuk mencapai visi dan misi tersebut.³³

- b. Memilih berdasarkan rekam jejak
- Mengenali rekam jejak mereka dalam berkarier politik atau pengalaman sebelumnya dalam pemerintahan atau pekerjaan yang relevan. Selain itu, masyarakat memilih calon kepala daerah yang tidak pernah terlibat dalam politik uang dan tindak pidana korupsi.

³¹“Pemilihan Umum Bupati Jepara 2017”, 2017 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Bupati_Jepara_2017 diakses pada tanggal 2 Februari 2023

³² Hasil wawancara dengan SAN sebagai Pekerja Pabrik 13, 8 Oktober 2023

³³ Jegen Musfah,” Memilih Pemimpin Ideal”, jegen.lec.uinjkt.ac.id, <http://jegen.lec.uinjkt.ac.id/home-1/memilihpemimpinideal>

- c. Memilih secara asal dan rekomendasi dari orang lain. Kesadaran politik sangat diperlukan pada saat pemilihan suara, karena dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. Dimana terdapat partisipasi politik tanpa adanya kesadaran politik, seperti pemilih yang menggunakan pilihannya untuk memilih secara asal. Bahan seringkali ditemukan pemilih yang melakukan pemilihan berdasarkan rekomendasi orang lain. Sebaliknya, ketika partisipasi politik didasari dengan kesadaran politik, maka akan menghasilkan pilihan terbaik yang sesuai dengan aspirasinya masing-masing.³⁴

Pilkada merupakan ajang pemilihan yang dinantikan oleh masyarakat di setiap daerah. Sebelum diadakannya pemilihan kepala daerah, masyarakat memerlukan beberapa informasi terkait dengan calon kepala daerah mulai dari profil calon, visi misi, dan program kerja agar dapat menentukan calon yang akan dipilihnya. Dengan ini maka penting bagi calon kepala daerah untuk melakukan komunikasi politik agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang calon tersebut. Selain itu komunikasi politik juga dapat membantu masyarakat memahami kriteria ideal calon kepala daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Komunitas Perempuan Pekerja Pabrik biasanya mengetahui informasi tentang calon kepala daerah dengan berbagai cara, seperti melalui media sosial misalnya: *Facebook dan Instagram*, berita online di internet, baliho, dan spanduk³⁵ Selain itu diskusi dengan orang lain seperti: diskusi dengan teman, keluarga, dan rekan kerja serta kampanye *Door to Door*.³⁶

Saat pemilihan kepala daerah memerlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam demokratisasi, karena dapat mempengaruhi, memperoleh, dan mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga dapat membantu memastikan bahwa keputusan politik yang di ambil

³⁴ Hemafitria, Novianty, and Fitriani, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas.47."

³⁵ Hasil Wawancara dengan KW sebagai Pekerja Pabrik 1, 7 Oktober 2023

³⁶ Hasil Wawancara dengan MUS sebagai Pekerja Pabrik 10, 7 Oktober 2023

mewakili keinginan dan aspirasi seluruh rakyat.³⁷ Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat mempunyai banyak bentuk. Bentuk partisipasi politik masyarakat saat pilkada seperti: menghadiri rapat umum, memberikan suara, melakukan kampanye, debat politik, menjadi tim sukses calon dan panitia pemilihan.

Namun pada saat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara, bentuk partisipasi politik komunitas perempuan pekerja pabrik hanya sekedar memberikan suara dalam pemilihan. Hal ini dikarenakan mereka sehari-hari sibuk bekerja di pabrik dan ada pula yang sudah berumah tangga, sehingga tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai ketertarikan pada kegiatan pemilu selain memberikan suara pada saat pemilihan.³⁸ Meskipun bentuk partisipasi politik komunitas perempuan pekerja pabrik hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu, namun mereka sudah tergolong dalam partisipasi aktif, partisipasi konvensional, dan pengamat.

Menurut Muhammad Abdus Salim, partisipasi politik ada bentuk yaitu: a) Partisipasi aktif, merupakan partisipasi politik yang menitikberatkan pada proses masukan dan keluaran. Artinya setiap orang menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah serta mempunyai kesadaran politik. Partisipasi masyarakat mencakup kegiatan seperti kemampuan merumuskan kebijakan publik, mengusulkan alternatif kebijakan publik yang berbeda dari kebijakan pemerintah, memberikan kritik serta koreksi terhadap perbaikan kebijakan publik, memberikan suara dan memilih pemimpin pemerintahan. b) partisipasi pasif, merupakan partisipasi politik yang hanya terfokus pada proses keluaran, yaitu mengikuti perintah penguasa atau pemerintah, menerima serta menjalankan semua keputusan yang dibuat pemerintah. c) Golongan putih (golput) atau golongan apatis, merupakan

³⁷ A Rahman Zainuddin, *Partisipasi Politik Buruh Perempuan Pasca Orde Baru*: Studi Kasus Pabrik Garmen PT. Tongkyung Makmur Abadi Di Jakarta, 2002.

³⁸ Hasil wawancara dengan NR sebagai Pekerja Pabrik 11, 15 Oktober 2023

golongan yang menilai sistem politik saat ini telah melenceng dari apa yang mereka perjuangkan dan di harapkan.³⁹

Adapun komunitas perempuan pekerja pabrik menurut peneliti bisa dikategorikan menjadi bentuk partisipasi aktif karena mereka mau menyuarakan suara pada pemilu dan memilih pemimpin pemerintah. Selain itu mereka juga aktif mengajukan usul alternatif kebijakan publik misalnya mengajukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Sementara itu dalam buku Perbandingan Sistem Politik yang disunting oleh Mas'ood dan Mc Andrews dalam Damsar, Almond membedakan dua bentuk Partisipasi politik, yaitu:⁴⁰

- a. Partisipasi politik konvensional, merupakan bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam bentuk demokrasi modern. Misalnya: diskusi politik, pemberian suara (voting), kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative.
- b. Partisipasi non konvensional, merupakan bentuk partisipasi politik yang biasanya tidak terjadi dalam kondisi normal dan bahkan dapat bersifat ilegal, kekerasan, dan revolusioner.

Adapun komunitas perempuan pekerja pabrik menurut peneliti bisa dikategorikan menjadi bentuk partisipasi politik konvensional karena mereka mau memberikan suara (voting) pada pemilihan kepala daerah Jepara 2017 dan aktif dalam diskusi politik baik diskusi dengan keluarga, tetangga, ataupun teman kerja.

Sementara itu menurut teori David Roth dan Frank L. Wilson bahwa partisipasi politik bersifat hierarki dalam bentuk piramida sebagai berikut:

³⁹ Salim, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus Di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau).”

⁴⁰ Rush, Althoff, Pengantar Sosiologi Politik dalam Pengantar Sosiologi Politik oleh Damsar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 156

Gambar 4.1 Piramida Partisipasi Politik



Berdasarkan piramida tersebut kelompok apolitis adalah kelompok yang sama sekali tidak berhubungan serta tidak terlibat dalam kegiatan politik. Sementara kelompok pengamat merupakan kelompok yang senantiasa berbicara tentang politik, mengikuti informasi politik di media massa, mengetahui parpol dan ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilu. Selanjutnya kelompok partisipan yaitu anggota aktif parpol yakni pihak yang terlibat langsung dalam politik serta bekerja untuk kepentingan kegiatan sosial. Dan terakhir kelompok aktivis yaitu pimpinan partai politik yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam akses politik serta kelompok yang terlibat penuh dalam aktivitas politik.⁴¹

Adapun komunitas perempuan pekerja pabrik menurut peneliti bisa dikategorikan menjadi bentuk partisipasi politik kelompok pengamat karena melakukan salah satu kegiatan pada kelompok tersebut yaitu memberikan suara pada pemilu.

2. Motif yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Komunitas Pekerja Pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil analisis data wawancara, partisipasi politik komunitas pekerja pabrik di Kecamatan Mayong pada pilkada 2017 di Kabupaten Jepara terdapat berbagai motif yang mempengaruhi partisipasi dalam pilkada. Berikut beberapa motif yang mempengaruhi partisipasi politik komunitas pekerja

⁴¹ Ruphi, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kelurahan Tamarum Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.”

pabrik di Kecamatan Mayong pada pilkada 2017 di Kabupaten Jepara:

a. Kesadaran politik

Banyak masyarakat yang melihat partisipasi dalam pemilihan sebagai hak dan kewajiban warga negara.⁴² mereka merasa bahwa dengan memberikan suara, mereka berkontribusi pada proses demokrasi dan pembentukan pemerintah yang mewakili kepentingan rakyat.

Kesadaran politik dapat memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pilkada, sebab mereka menyadari pentingnya peran politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya kesadaran politik, masyarakat dapat mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memilih pemimpin yang tepat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di daerah serta memiliki integrasi yang baik. Selain itu, kesadaran politik juga membantu masyarakat memahami kriteria ideal calon kepala daerah yang tepat.⁴³

b. Mencari pemimpin yang diinginkan

Beberapa pemilih mungkin memiliki kandidat tertentu yang mereka dukung karena pemahaman dan keyakinan yang sama mengenai isu-isu tertentu. Mereka memilih untuk mengikuti pemilu untuk memberikan dukungan kepada calon tersebut.

c. Ajakan dari teman dan keluarga.

Pemilih karena ajakan dari teman dan keluarga menyoroti pengaruh sosial yang signifikan dalam partisipasi politik. Ini juga mencerminkan bagaimana dukungan dan interaksi dalam lingkungan sosial dapat memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan demokrasi.

Motif ini muncul ketika seseorang diundang atau diajak oleh teman, keluarga, atau rekan-rekan dekatnya

⁴² Hasil wawancara dengan SN sebagai Pekerja Pabrik 13, 22 Oktober 2023

⁴³ Kifly CH Setligt, "Perilaku Politik Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik," *Jurnal Ilmu Politik*, 2013, 3.

untuk berpartisipasi dalam pilkada. Ajakan ini dapat berupa undangan untuk datang ke tempat pemungutan suara.⁴⁴

- d. Khawatir terhadap manipulasi hasil perolehan suara ketika tidak menggunakan hak pilihnya.

Kekhawatiran terhadap manipulasi hasil perolehan suara adalah motif yang menekankan pentingnya partisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum sebagai bentuk menjaga integritas dan akuntabilitas demokrasi.

Masyarakat mungkin khawatir bahwa jika mereka tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada dapat memberikan peluang memanipulasi hasil pemilihan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu yang tidak mempunyai niat baik.⁴⁵

Pilkada merupakan ajang untuk memilih pemimpin dan melakukan pergantian pemimpin daerah yang baru. Pergantian kepala daerah merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena di sinilah masyarakat menaruh harapan-harapan untuk kesejahteraan masyarakat, tak terkecuali komunitas-komunitas perempuan pekerja pabrik. Adapun beberapa harapan yang diinginkan komunitas perempuan pekerja pabrik di Kecamatan Mayong jika terjadi pergantian pemimpin daerah yang baru, antara lain:

- a. Adanya peraturan yang dapat melindungi pekerja pabrik

Melindungi pekerja adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pekerja merasa aman saat bekerja. Dalam dunia kerja seringkali terjadi tindak kekerasan yang dialami oleh pekerja, termasuk juga pekerja pabrik di Mayong. Mereka seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh atasan dikarenakan tidak sengaja melakukan kesalahan saat bekerja. Akibatnya, mereka seringkali mendapatkan kekerasan verbal seperti kata-kata kotor, intonasi bernada tinggi hingga tatapan tajam, sehingga kejadian tersebut dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental pekerja

⁴⁴ Rapida Nuriana et al., "Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Di Kepulauan Riau," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 229, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.206>.

⁴⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada 2018*, 2018.

pabrik.⁴⁶ Selain itu pada kasus sama juga mengakibatkan tidak nafsu makan, gelisah, dan menangis saat ditempat kerja maupun setelah pulang kerja serta tidak berani untuk minta izin buang air kecil, dikenakan jeda kerja dapat berpengaruh dan berdampak pada produktivitas serta kemampuannya dalam mencapai target.⁴⁷

Selain mendapatkan kekerasan verbal, pekerja pabrik juga mendapatkan kekerasan seksual. Seperti halnya kasus di salah satu pabrik di Jepara, beberapa pekerja pabrik mendapatkan pelecehan seperti dipegang pada bagian sensitif oleh atasan. Tidak hanya sekali saja, pelaku melakukan aksi asusila tersebut hingga beberapa kali. Karena seringkali mengalami pelecehan di tempat kerja, mengakibatkan pekerja pabrik korban pelecehan merasa stres hingga melakukan libur selama tiga hari untuk menghilangkan rasa trauma.⁴⁸

Perilaku pelecehan dan kekerasan merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan memalukan yang membuat seseorang merasa terhina, takut dan merasa tidak nyaman. Perilaku pelecehan terdapat empat macam yaitu, pelecehan verbal, pelecehan fisik, pelecehan psikologis dan pelecehan seksual. Pelecehan verbal merupakan pelecehan yang berupa ucapan yang menghina, merendahkan, berteriak dengan bahasa kasar, memaki serta berteriak dengan bahasa dan nada yang kasar. Pelecehan fisik merupakan dapat berupa menendang, mendorong, menampar, menganiaya, dan melempar benda. Sedangkan pelecehan psikologis dapat berupa mengintimidasi pekerja, meminta pekerja berdiri selama 15 menit jika sehari

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan ENM sebagai Pekerja Pabrik 7, 7 Oktober 2023

⁴⁷ Tri Wahyuni, “Kesaksian Pegawai Indonesia Soal Kekerasan di Dunia Kerja: Jidat Saya Ditoyor, Bahu Saya Didorong”, BBC News Indonesia, 2022, diakses pada tanggal 23 November 2023 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61503709>

⁴⁸ Budi Arista Romadhani, “Pelecehan Seksual dan Derita Buruh Wanita di Jepara: Dipegang Bagian Sensitif, Saya Trauma” suarajawatengah.id, 2022, diakses pada tanggal 24 November 2023 <https://www.google.com/amp/s/jateng.suara.com/amp/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma>

sebelumnya tidak berangkat kerja, dan menyindir pegawai ketika tidak bisa memenuhi target produksi. Sementara itu, pelecehan seksual dapat berupa pelukan, sentuhan pada bagian tubuh yang sensitif, tatapan mata dengan pandangan menggoda, mencium, dan menepuk pinggang atau pantat.

Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan membuat peraturan-peraturan yang dapat melindungi pekerja pabrik, misalnya dengan cara meratifikasi Konvensi ILO 190. Pada konvensi ini mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sejak calon pekerja melamar pekerjaan dari kekerasan dan pelecehan. Dalam Konvensi ILO 190 ini mengakui adanya pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, oleh karena itu setiap pekerja harus diberikan perlindungan dan bebas dari pelecehan dan kekerasan. Konvensi ini mengartikan pelecehan dan kekerasan sebagai perilaku yang tidak bisa diterima yang memungkinkan adanya kerusakan, baik kerusakan ekonomi, fisik, seksual, ataupun psikologis seseorang. Termasuk juga adanya ancaman, intimidasi dan berbagai macam pelecehan baik verbal, fisik, psikologis, dan seksual.⁴⁹

Selain itu pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan kebijakan guna untuk melindungi pekerja dari berbagai kekerasan seksual. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Kepmenaker yang merupakan pembaruan dari surat edaran Menaker tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, diharapkan dapat menjadi angin segar dalam upaya mengatasi kekerasan seksual di tempat kerja.⁵⁰

⁴⁹ Nurhadi Sucahyo, “Buruh Perempuan Tuntut Dunia Kerja Bebas Kekerasan”, voaindonesia.com, 2022, diakses pada tanggal 24 November 2023 <https://www.voaindonesia.com/a/buruh-perempuan-tuntut-dunia-kerja-bebas-kekerasan-/6552383.html>

⁵⁰ “Butuh Solusi Atasi Kekerasan Seksual di Industri Garmen”, mediaindonesia.com, 2023, diakses pada tanggal 26 November 2023 <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/588342/butuh-solusi-atasi-kekerasan-seksual-di-industri-garmen>

Selain terjadi tindak kekerasan, pekerja pabrik juga sering mengalami budaya kerja kejar target. Budaya kerja kejar target di pabrik terutama terkait dengan sift panjang dan target produksi merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Seperti halnya beberapa pabrik di Jepara yang menerapkan sistem target produksi, biasanya pabrik tersebut menerapkan jam molor hingga selesainya target produksi. Jam molor artinya waktu dimana pekerja pabrik bekerja tanpa dibayar dan tidak dihitung lembur juga atau bisa diartikan sebagai kerja bakti saja. Misalnya pulang kerja jam 4 sore dan melakukan lembur selama 2 jam, akan tetapi belum bisa menyelesaikan target produksi akhirnya pulangny menjadi molor bahkan hingga 1 jam.⁵¹ Bagi pekerja pabrik di Jepara sendiri sudah hafal dengan jam molor, mungkin faktor butuh pekerjaan sehingga mau tidak mau harus wajib mengikuti aturan yang berlaku pada tiap pabrik.

b. Mendapatkan kenaikan UMR

Pada umumnya, Upah Minimum Regional (UMR) adalah batas standar yang ditentukan pemerintah agar pengusaha dapat memberikan upah pekerjanya secara layak). Kenaikan UMR biasanya ditetapkan setahun sekali. Kenaikan UMR merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pekerja terutama pekerja pabrik.⁵² Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, UMR di Kabupaten Jepara dalam 3 tahun mengalami kenaikan. Berikut data UMR di Kabupaten Jepara:

Tabel 4.7 Data UMR Kabupaten Jepara

2021	2022	2023
Rp 2.107.000	Rp2.108.403	Rp 2.272.627

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Komunitas Perempuan Pekerja Pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil analisis data wawancara, partisipasi politik komunitas pekerja pabrik di Kecamatan Mayong pada

⁵¹ Hasil Wawancara dengan ELM sebagai Pekerja Pabrik 4, 8 Oktober 2023

⁵² Hasil Wawancara dengan LN sebagai Pekerja Pabrik 14, 22 Oktober 2023

pilkada 2017 di Kabupaten Jepara terdapat faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik, antara lain:

a. Faktor Pendukung Partisipasi Politik Komunitas Perempuan Pekerja Pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara

1) Memiliki kesadaran menyuarakan hak pilih.

Faktor pendukung yang melatarbelakangi partisipasi politik komunitas pekerja pabrik pada pilkada 2017 salah satunya yaitu adanya kesadaran politik. Berdasarkan hasil penelitian, komunitas perempuan pekerja pabrik banyak yang memiliki perasaan bahwa menggunakan hak pilih merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara.⁵³ Hal ini mendorong mereka untuk ikut serta dalam kegiatan pilkada tahun 2017, khususnya dalam hal pemungutan suara. Karena partisipasi politik mereka sangat penting dan berpengaruh bagi kegiatan pemilihan umum tersebut.

Oleh karena itu, sebagai warga negara hendaknya bijak dalam menggunakan hak pilihnya dan hendaknya menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan pemimpin terbaik yang dapat menjalankan amanah.⁵⁴ Sayang sekali kalau disia-siakan dan tidak dimanfaatkan apa yang seharusnya menjadi milik mereka.

Memiliki kesadaran dalam menyuarakan hak pilih pada pilkada adalah langkah positif yang menunjukkan pemahaman dan tanggung jawab warga negara terhadap proses demokrasi. Kesadaran politik mencakup pemahaman menyeluruh tentang hak serta tanggung jawabnya sebagai pemilih. Komunitas perempuan pekerja pabrik yang sadar politik menyadari pentingnya hak pilih mereka dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan daerah.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian lain komunitas perempuan pekerja pabrik juga khawatir adanya manipulasi suara yang dilakukan oleh pihak-

⁵³ Hasil Wawancara dengan SAN sebagai Pekerja Pabrik 3, 8 Oktober 2023

⁵⁴ Agnes Aulia, "Tarf Keterlibatan Aktif Pemilih Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Serentak 2020" 12, no. 02 (2023): 137.

pihak tertentu dengan menambahkan suara pada salah satu calon semisal mereka melakukan golput atau tidak ikut memilih.⁵⁵ Dengan itu maka setiap orang diharuskan untuk memahami betapa pentingnya suara dan menyuarakan hak pilih.

2) Lokasi pemilihan yang dekat dan mudah diakses

Lokasi pemilihan yang dekat atau mudah diakses adalah faktor pendukung yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama komunitas perempuan pekerja pabrik.⁵⁶ Lokasi pemilihan yang dekat dengan tempat tinggal memudahkan pemilih untuk mencapai tempat pemungutan suara. Kemudahan akses ini dapat meminimalkan hambatan fisik yang mungkin menghalangi partisipasi politik.

Kedekatan lokasi pemilihan dapat merangsang partisipasi politik di tingkat lokal. Sehingga komunitas perempuan pekerja pabrik lebih termotivasi untuk memberikan suara jika mereka tahu bahwa tempat pemungutan suara berada dalam jarak yang mudah dijangkau.

Selain itu, lokasi yang dekat dapat mengurangi biaya dan waktu tempuh untuk sampai di tempat pemungutan suara. Pemilih tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang signifikan atau menghabiskan waktu yang lama hanya untuk memberikan suara. Lokasi yang dekat dapat memberikan fleksibilitas waktu bagi pemilih komunitas perempuan pekerja pabrik dapat dengan mudah memberikan suara tanpa merasa terbatas oleh jarak, yang dapat meningkatkan partisipasi pada waktu pemilihan.⁵⁷

3) Mendapatkan dukungan

Dukungan dapat menjadi faktor penting yang mendukung partisipasi politik seseorang. Dukungan

⁵⁵ Hasi wawancara dengan KW sebagai Pekerja Pabrik 1, 7 Oktober 2023

⁵⁶ Hasil wawancara dengan AL sebagai Pekerja Pabrik 8, 29 Oktober 2023

⁵⁷ Cincin Sulastri Ningsy, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur" (2022), <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>.

tersebut dapat datang dari berbagai sumber, misalnya teman, keluarga, tetangga, ataupun kelompok masyarakat. Dukungan ini menjadi sumber motivasi bagi seseorang. Ajakan dan dukungan emosional dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada.

Pada saat hari pemilihan, ajakan langsung dari teman atau keluarga untuk memberikan suara dalam pilkada dapat memberikan dorongan tambahan.⁵⁸ Hal ini dapat membangkitkan kesadaran akan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil penelitian, komunitas perempuan pekerja pabrik menjadi termotivasi untuk memberikan suara dalam pilkada dikarenakan mendapatkan dorongan dari keluarga, teman, ataupun tetangga. Biasanya mereka mendapatkan dorongan berupa ajakan untuk pergi ke tempat pemungutan suara secara bersama-sama

b. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Komunitas Perempuan Pekerja Pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara

1) Kesibukan kegiatan sehari-hari.

Faktor kesibukan kegiatan sehari-hari merupakan salah satu hambatan umum yang dapat menghalangi partisipasi politik seseorang. Kehidupan yang sibuk dan padat aktivitas seringkali memuat seseorang kesulitan untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Kesibukan sehari-hari seringkali mengakibatkan keterbatasan waktu bagi seseorang.⁵⁹ Tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan kegiatan lainnya dapat membuat sulit mereka untuk menemukan waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Hal itu yang dirasakan oleh komunitas perempuan pekerja pabrik di kecamatan Mayong yang sebagian besar sudah berumah tangga. Selain mereka sibuk bekerja di pabrik, mereka juga sibuk mengurus

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan KW sebagai Pekerja Pabrik 1, 7 Oktober 2023

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan KW sebagai Pekerja Pabrik 1, 7 Oktober 2023

keluarganya. Oleh karena itu, mereka lebih memperhatikan untuk mengurus keluarganya dari pada berpartisipasi dalam kegiatan pilkada selain menyuatkan hak pilih.

Kesibukan dapat berdampak pada tingkat ketidakpedulian terhadap politik. Komunitas perempuan pekerja pabrik yang sibuk mungkin cenderung kurang memperhatikan isu-isu politik atau merasa bahwa keterlibatan politik bukanlah kebutuhan mereka saat ini. Selain itu, keterbatasan waktu juga dapat menghambat akses seseorang terhadap informasi politik. Komunitas perempuan pekerja pabrik mungkin tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membaca berita tentang pilkada, menyelidiki calon, dan mengikuti perkembangan pilkada.

Faktor kesibukan dalam kegiatan sehari-hari dapat mempengaruhi partisipasi politik dalam beberapa tingkat. Untuk mengatasi hambatan ini, mungkin diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran politik, memudahkan akses informasi, dan menciptakan insentif yang dapat mendorong partisipasi politik di tengah kesibukan hidup sehari-hari.

2) Kurangnya pengetahuan tentang politik

Kurangnya pendidikan politik adalah faktor penghambat yang signifikan dalam partisipasi politik. Pendidikan politik yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman individu tentang sistem politik, hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam politik.

Komunitas perempuan pekerja pabrik dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kesadaran politik yang terbatas mungkin kurang termotivasi untuk terlibat dalam partisipasi politik karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya kontribusi mereka.⁶⁰ Selain itu, komunitas perempuan pekerja pabrik yang kurang teredukasi politik mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana proses politik berlangsung, termasuk cara kerja pemilihan dan pengambilan keputusan politik.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan MUS sebagai Pekerja Pabrik 10, 29 Oktober 2023

Pendidikan politik yang rendah juga dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran politik. Komunitas perempuan pekerja pabrik mungkin tidak tahu tentang isu-isu politik terkini terkait dengan pilkada, dan calon-calon yang berpartisipasi dalam pilkada.

Oleh karena itu, mengatasi kurangnya pendidikan politik melibatkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan politik yang berkualitas, memperkuat kurikulum pendidikan, mendorong kesadaran politik di kalangan masyarakat. Pendidikan politik yang baik dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik dan memberdayakan warga negara.⁶¹

3) Kurangnya kepercayaan kepada para kandidat.

Kurangnya kepercayaan terhadap para kandidat kepala daerah adalah salah satu penghambat komunitas perempuan pekerja pabrik dalam partisipasi politik. Kepercayaan yang rendah terhadap calon kepala daerah dapat mengurangi motivasi individu untuk terlibat dalam pemilihan dan proses politik.

Rendahnya kepercayaan terhadap calon kepala daerah yang dialami komunitas perempuan pekerja pabrik ini disebabkan karena ketidakpuasan terhadap kinerja kepala daerah saat ini. Mereka merasa tidak puas dengan kinerja pemimpin saat ini, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap kandidat baru. Mereka mungkin khawatir bahwa calon baru juga tidak akan memenuhi harapan atau tidak dapat mengatasi masalah yang ada.

Selain itu, adanya skandal atau kasus korupsi. Kasus korupsi atau skandal yang melibatkan kepala daerah dapat merusak kepercayaan masyarakat terutama komunitas perempuan pekerja pabrik.⁶²

⁶¹ Firdha Rezki Dwitya Anggiriani Rifai, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah)" (2023), <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>.

⁶² Hasil Wawancara dengan SAN sebagai Pekerja Pabrik 3, 8 Oktober 2023

Terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah Kabupaten Jepara yang pernah menjabat selama 2 periode yakni Muhammad Marzuqi, membuat komunitas perempuan pekerja pabrik merasa kecewa karena pemimpin yang mereka pilih melakukan korupsi. Sehingga, tidak menutup kemungkinan terselenggaranya pilkada selanjutnya membuat komunitas perempuan pekerja pabrik merasa khawatir jika salah pilih dalam memilih kepala daerah selanjutnya.

Kurangnya kepercayaan terhadap para kandidat kepala daerah juga menumbuhkan rasa masa bodoh terhadap pilihannya, dikarenakan tidak adanya calon kepala daerah yang ingin dipilihnya. Sehingga komunitas perempuan pekerja pabrik melakukan pilihan secara asal tanpa adanya pertimbangan yang matang.⁶³



⁶³ Hasil Wawancara dengan FDN sebagai Pekerja Pabrik 5, 22 Oktober 2023